



MODEL ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN TEMATIK INSPEKTORAT DAERAH: STUDI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Rio A. Lombone

Inspektur Daerah, Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow,
Provinsi Sulawesi Utara

Pendahuluan

Pengawasan tematik merupakan instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Pengawasan tidak hanya dituntut untuk memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga untuk menjadi alat koreksi institusional yang mampu mendorong perubahan sistemik. Namun, di Kabupaten Bolaang Mongondow, fungsi ini masih belum berjalan secara optimal.

Data dari BPK Perwakilan Sulawesi Utara (2023) menunjukkan bahwa sebesar 55% temuan dalam pengawasan tematik di Kabupaten Bolaang Mongondow bersifat berulang, terutama pada aspek pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan dasar. Ini memberikan gambaran bahwa belum tercapainya efektivitas pengawasan sebagai mekanisme pembelajaran organisasi dan koreksi kelembagaan yang disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya

Policy Brief Series

Agustus 2025



Ditujukan Kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow

Ringkasan Eksekutif

Pengawasan tematik merupakan strategi penting dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Bolaang Mongondow masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi pendekatan administratif, lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan tidak terintegrasinya sistem informasi pengawasan. Policy Brief ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip *adaptive governance* dalam pengawasan tematik dan merumuskan model yang sesuai dengan konteks lokal.

Bahwa prinsip *adaptive governance* seperti kolaborasi lintas aktor, pembelajaran berkelanjutan, desentralisasi keputusan, dan fleksibilitas sistem sangat relevan dalam memperkuat pengawasan tematik. Sehingga kami merekomendasikan Model ADAPT (*Agenda Setting Partisipatif, Data-Driven Risk Mapping, Action-Oriented Audit, Partnership and Learning Loop, serta Technology-Enabled Monitoring*) sebagai kerangka kerja yang mampu menjawab tantangan pengawasan tematik di tingkat daerah.

Model ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan menuju tata kelola yang lebih adaptif dan partisipatif.



Pertama, lemahnya mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan menyebabkan rekomendasi tidak diimplementasikan secara sistematis oleh OPD terkait. Minimnya sistem pelacakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi membuat siklus kesalahan tidak terputus.

Kedua, kualitas rekomendasi pengawasan yang masih normatif dan prosedural menyebabkan daya koreksinya rendah. Pendekatan audit lebih menekankan pada aspek kepatuhan administratif dibandingkan analisis terhadap akar masalah kelembagaan atau risiko kebijakan.

Ketiga, rendahnya kualitas dan integrasi data pengawasan antar-OPD menjadi hambatan dalam mendeteksi pola temuan berulang secara sistemik. Ketidakterhubungan data menyebabkan pengambilan keputusan dalam pengawasan cenderung tidak berbasis bukti dan tidak proaktif.

Keempat, keterbatasan kapasitas SDM baik dari sisi auditor maupun pihak yang diawasi turut memperburuk keadaan. Auditor belum banyak dibekali kompetensi risk-based auditing dan analitik data, sedangkan OPD sering kali belum memiliki kultur manajemen yang terbuka terhadap perbaikan kelembagaan.

Kelima, budaya organisasi yang cenderung defensif dan hierarkis menghambat pembelajaran kelembagaan. Pengawasan sering diposisikan sebagai fungsi kontrol eksternal semata, bukan sebagai mitra untuk refleksi dan pembenahan proses tata kelola secara internal. Akumulasi dari kondisi tersebut menyebabkan pengawasan kehilangan daya dorongnya sebagai instrumen transformasi tata kelola.

Deskripsi Masalah

Di Kabupaten Bolaang Mongondow, pelaksanaan pengawasan masih didominasi oleh pendekatan administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, bukan pada penilaian kinerja substantif dari kebijakan tematik yang telah dirancang oleh pemerintah daerah.

Agenda pengawasan tematik sering kali belum disusun secara partisipatif, sehingga isu-isu lokal yang mendesak seperti kemiskinan ekstrem, ketimpangan pelayanan publik di wilayah terpencil, atau penyalahgunaan dana desa, belum sepenuhnya terakomodasi dalam fokus pengawasan.

Selain itu, kendala dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang belum sinergis dengan sistem perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD) berdampak pada hasil pengawasan tematik tidak selalu memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kebijakan atau pelaksanaan program prioritas daerah.

Koordinasi lintas sektor, khususnya antara Inspektorat Daerah dengan perangkat daerah pelaksana program tematik, belum berjalan optimal dan masih bersifat sektoral. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam tubuh Inspektorat.

Auditor yang memiliki kompetensi spesifik di bidang audit kinerja dan audit berbasis risiko masih sangat terbatas. Sebagian besar SDM Inspektorat masih berorientasi pada pemeriksaan administratif, bukan pada evaluasi dampak kebijakan atau pencapaian outcome pembangunan tematik.

Sistem informasi pengawasan belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Penggunaan teknologi digital dalam mendukung pelaksanaan pengawasan masih minim, menyebabkan proses dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan berjalan lambat, tidak sistematis, dan kurang transparan. Lemahnya mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

Banyak temuan pengawasan yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh organisasi perangkat daerah terkait, akibat kurangnya sanksi yang tegas atau insentif yang jelas untuk mendorong perubahan perilaku birokrasi.



Alternatif Kebijakan

Berdasarkan temuan analisis sebelumnya, pendekatan yang paling sesuai adalah Model ADAPT (Adaptive Thematic Supervision Model). Model ADAPT merupakan akronim dari lima pilar utama berikut:

A – Agenda Setting Partisipatif

Proses penyusunan agenda pengawasan dilakukan secara inklusif melalui pelibatan pemangku kepentingan lokal seperti masyarakat sipil, akademisi, dan OPD pelaksana program. Forum konsultatif ini memastikan bahwa fokus pengawasan benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas pembangunan daerah, seperti penanggulangan kemiskinan, perbaikan layanan pendidikan, dan pengelolaan dana desa.

D – Data-Driven Risk Mapping

Model ini menekankan pentingnya pemetaan risiko tematik berbasis data. Pengawasan diarahkan pada area yang memiliki potensi kegagalan tertinggi atau berdampak besar terhadap masyarakat. Penggunaan data sektoral dan spasial memungkinkan auditor mengidentifikasi wilayah-wilayah rawan, baik dari aspek fiskal, sosial, maupun kinerja kelembagaan.

A – Action-Oriented Audit

Audit yang dilaksanakan dalam kerangka model ADAPT tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga mengevaluasi keberhasilan implementasi program, efisiensi anggaran, serta efektivitas dampak. Temuan audit diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang relevan, serta memicu perbaikan berkelanjutan.

P – Partnership and Learning Loop

Pengawasan dilakukan dalam kerangka kemitraan antara Inspektorat Daerah dan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, BPKP, dan masyarakat. Model ini juga menekankan pentingnya siklus pembelajaran, di mana setiap hasil pengawasan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, penyusunan ulang strategi pengawasan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

T – Technology-Enabled Monitoring

Penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti dashboard tematik pengawasan, pelaporan elektronik, dan pemantauan berbasis aplikasi. Teknologi ini mempercepat alur kerja pengawasan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan pengawasan tematik di Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat direkomendasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip adaptive governance sangat relevan untuk menjawab tantangan dalam pengawasan tematik. Prinsip-prinsip seperti inklusivitas, fleksibilitas, kolaborasi lintas sektor, dan pembelajaran berkelanjutan memungkinkan sistem pengawasan lebih tanggap terhadap dinamika sosial dan kompleksitas tata kelola lokal. Selain itu, Model ADAPT (Adaptive Thematic Supervision Model) direkomendasikan sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk membangun sistem pengawasan tematik yang adaptif di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2011). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwanto, E. A., & Pramusinto, A. (2019). Collaborative governance in public service innovation: A case of One Stop Service in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 32(3), 244–260.
- Setiawan, T. (2020). Evaluasi efektivitas pengawasan internal berbasis data di pemerintah daerah. *Jurnal Pengawasan Keuangan Negara*, 6(1), 45–60.
- Wahyudi, A. (2021). Tata kelola kolaboratif dalam pengawasan pembangunan desa di Indonesia: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 75–90.